

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kronologi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak menunjukkan bahwa sistem pemilu Indonesia masih jauh dari kata demokratis. Telah terbukti bahwa baik peserta pemilu melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu dan Kelalaian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Kecurangan dalam pemilu berdampak pada penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah maupun opini publik terhadap penyelenggara pemilu.
2. Faktor - faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran pada pemilu tahun 2024 di Desa Tenggak mencakup masalah logistik, malpraktek penyelenggara, kurangnya pengawasan, dan ketidakpuasan masyarakat. Dari hasil penelitian ini pelanggaran pemilu terjadi bukan hanya hasil dari masalah teknis, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Proses yang terjadi dan faktor-faktor penyebabnya memberikan gambaran penting mengenai perlunya perbaikan dalam manajemen pemilu, baik dari aspek logistik maupun pengawasan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang akan lebih transparan, adil, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada.
3. Tidak dapat dipungkiri bahwa Bawaslu Kabupaten Sragen telah melakukan beberapa tindakan ceroboh dan tidak profesional dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Desa Tenggak. Padahal pengawasan telah dilakukan secara efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan dalam laporan hasil pengawasan.

4.2 Saran

A. Saran bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Desa Tenggak Kabupaten Sragen

1. Peningkatan Manajemen Logistik Pemilu

Diperlukan perbaikan dalam manajemen dan distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara dan bahan-bahan pemilu lainnya. KPU sebaiknya menyusun rencana distribusi yang lebih terstruktur dan tepat waktu, serta melakukan simulasi sebelum hari pemungutan suara untuk mengidentifikasi potensi masalah. Peningkatan komunikasi antara KPU dan pihak-pihak terkait, seperti pengawas pemilu dan petugas KPPS, sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebutuhan logistik terpenuhi dan disiapkan dengan baik.

2. Pelatihan dan Pembinaan untuk Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPPS, perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam mengenai prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengawasan. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan etika dalam penyelenggaraan pemilu untuk mencegah terjadinya malpraktek. KPU juga disarankan untuk melakukan pembinaan berkala agar petugas pemilu dapat memahami tanggung jawab mereka dengan lebih baik dan mampu menangani situasi yang tidak terduga di lapangan.

3. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi Proses Pemilu

Pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan di setiap tahap pemilu, mulai dari pemungutan suara hingga penghitungan suara. Bawaslu perlu memperkuat kapasitas pengawas pemilu dengan menambah jumlah personel di lapangan dan meningkatkan pelatihan untuk pengawas agar mereka dapat mendeteksi dan mencegah pelanggaran dengan lebih efektif. Selain itu, transparansi dalam setiap proses pemilu harus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi independen untuk memantau jalannya pemilu, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dapat terjaga.

4. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pemilih dan proses pemilu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu. KPU dan Bawaslu harus melibatkan berbagai media dan organisasi masyarakat sipil untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilu dan pentingnya memberikan suara. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan lebih banyak pemilih yang aktif berpartisipasi dalam pemilu, yang pada gilirannya akan meningkatkan legitimasi hasil pemilu.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Setelah setiap pemilu, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk proses PSU. Evaluasi ini harus melibatkan semua stakeholder terkait dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi, penyelenggaraan pemilu di masa mendatang diharapkan dapat lebih baik dan lebih dapat diandalkan.

B. Saran bagi Akademik

Peneliti berharap agar mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis akan menganggap penelitian ini berharga. Untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca di masa mendatang, peneliti juga berharap agar topik penelitian ini dapat meningkatkan atau melengkapi studi kasus dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan